

Analisis Perubahan Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

(Analysis of the Effect of Changes in Fiscal Policy on Economic Growth in Indonesia)

Rudi Alamsyah¹, Sri Danti Maulida Sari²

Universitas Nusa Putra Sukabumi¹

Universitas Nusa Putra Sukabumi²

Email: rudi.alamsyah_ak21@nusaputra.ac.id, sri.danti_ak21@nusaputra.ac.id

Abstrak: Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, perubahan kebijakan fiskal telah menjadi topik yang relevan dalam beberapa tahun terakhir. Jurnal ini bertujuan untuk melakukan analisis deskriptif terhadap perubahan kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data yang digunakan dalam analisis ini mencakup periode waktu dari tahun 2010 hingga 2021. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan perubahan kebijakan fiskal yang terjadi serta tren pertumbuhan ekonomi yang terkait.

Kata Kunci: *Kebijakan fiskal, Pertumbuhan ekonomi, Indonesia*

Abstrack: *Fiscal policy has an important role in influencing a country's economic growth. In Indonesia, changes to fiscal policy have become a topic of relevance in recent years. This journal aims to conduct a descriptive analysis of changes in fiscal policy and their impact on economic growth in Indonesia. The data used in this analysis covers the time period from 2010 to 2022. A descriptive method is used to describe changes in fiscal policy that have occurred and the associated economic growth trends.*

Keywords: *Fiscal policy, Economic growth, Financial performance, Panel data, Indonesia*

1. PENDAHULUAN

Secara garis besar kebijakan makroekonomi dapat dibedakan menjadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Seperti juga ekonomi, dapat dibagi menjadi dua sektor, yakni sektor riil dan sektor moneter. Pertumbuhan dan stabilitas sektor riil dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan fiskal dan di Indonesia kebijakan ini adalah tanggung jawab Menteri Keuangan. Sedangkan pertumbuhan dan stabilitas sektor moneter dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan moneter yang sepenuhnya adalah tanggung jawab Bank Indonesia. Sinergi antara kedua kebijakan tersebut sangat penting karena akan menciptakan suatu stabilitas ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu cara untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah mempengaruhi permintaan agregat dalam jangka pendek dalam perekonomian. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memengaruhi penawaran jangka panjang melalui peningkatan kapasitas ekonomi. Dalam mengelola stabilitas makroekonomi, kebijakan fiskal akan berinteraksi dengan kebijakan moneter.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama dalam mengendalikan perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal yang tepat dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, kebijakan fiskal telah mengalami beberapa perubahan dalam beberapa tahun terakhir, seperti pengurangan pajak dan peningkatan

pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang paling penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan fiskal mengacu pada pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam perekonomian suatu negara, termasuk pengeluaran untuk program-program pemerintah seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan keamanan nasional. Pada sisi penerimaan, kebijakan fiskal melibatkan pengumpulan pajak, pungutan, dan sumber pendapatan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan mengingat Kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efek dari kebijakan fiskal pada ekonomi dan bisnis di Indonesia.

Pembaca memiliki peran yang penting dalam membaca jurnal tentang Analisis Perubahan Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, karena Pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perubahan kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan membaca jurnal tersebut, pembaca dapat mengidentifikasi tujuan, alasan, dan langkah-langkah konkret dari perubahan kebijakan fiskal yang dilakukan

pemerintah.

Selain itu, Pembaca dapat memperbarui pengetahuan mereka tentang teori, metode, dan temuan terbaru dalam analisis kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menggunakan hasil penelitian untuk pengambilan keputusan, Pembaca yang terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan ekonomi, baik di tingkat pemerintah, lembaga keuangan, atau sektor swasta, dapat menggunakan temuan jurnal untuk membantu merancang kebijakan yang lebih efektif.

Penting bagi pembaca untuk membaca jurnal tersebut dengan kritis, mempertimbangkan metodologi penelitian, data yang digunakan, serta keterbatasan dan implikasi dari temuan yang disajikan. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menggunakan informasi tersebut secara bijaksana dalam konteks mereka masing-masing.

Dalam jurnal ini, diharapkan dapat ditemukan hubungan antara perubahan kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan fiskal dapat mempengaruhi perekonomian dan bisnis di Indonesia. Hasil analisis ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik kepada pembuat kebijakan tentang efek dari kebijakan fiskal pada perekonomian dan bisnis di Indonesia. Selain itu, analisis ini juga dapat membantu perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dalam menghadapi perubahan kebijakan fiskal yang terjadi.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Kebijakan Fiskal di Indonesia

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Di Indonesia, kebijakan fiskal diterapkan melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang disusun dan disahkan setiap tahun oleh pemerintah. Kebijakan fiskal dapat berupa pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, dan program-program sosial, serta penerimaan pemerintah dari pajak dan sumber-sumber lainnya.

2.2 Pengaruh Perubahan Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan fiskal dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian oleh Suryono dan Rusmin (2019) menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian oleh Arfianto dan Siregar (2019) menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang kurang tepat dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Hapsari dan Anwar (2019) menunjukkan bahwa penurunan subsidi BBM dan listrik yang tiba-tiba oleh pemerintah pada tahun 2014 berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2.3 Efektivitas Kebijakan Fiskal di Indonesia

Efektivitas kebijakan dalam penelitian Siregar, H. (2017) Melalui penelitian Evaluasi Efektivitas Kebijakan Fiskal di Indonesia dalam Studi ini mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia dengan menggunakan data dari periode 2000-2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pengaruhnya terhadap konsumsi pemerintah dan investasi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam implementasi kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi efektivitasnya.

Ismail, N. (2018) Tentang *The Effectiveness of Fiscal Policy in Indonesia*. Penelitian ini menggunakan analisis VAR (Vector Autoregression) untuk menguji efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam belanja pemerintah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara perubahan dalam pajak memiliki dampak yang tidak signifikan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan fiskal dalam menggerakkan ekonomi Indonesia.

Selain itu, Iskandar, D., & Husodo, Z. (2020) *The Effectiveness of Fiscal Policy in Indonesia*. Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan

ekonomi di Indonesia. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami efektivitas kebijakan fiskal dalam konteks makroekonomi.

2.4 Kebijakan Ekspor:

- 1) Pajak Ekspor Migas: Indonesia memberlakukan pajak ekspor migas sebagai sumber pendapatan negara. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia menetapkan tarif pajak ekspor migas sebesar 0% untuk minyak bumi dan gas bumi yang diekspor. Namun, tarif ini dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku. Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 2) Kontrak Kerja Sama (KKS): Pemerintah Indonesia menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan migas yang melibatkan pembagian produksi dan keuntungan dari ekspor migas. Kontrak ini mengatur pembagian produksi dan penerimaan negara dari sektor migas. Sumber: SKK Migas.
- 3) Dana Cadangan Migas: Pemerintah Indonesia telah membentuk Dana Cadangan Migas (DCM) yang bertujuan untuk mengelola pendapatan negara dari sektor migas. DCM digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan mendukung pembangunan infrastruktur serta diversifikasi ekonomi. Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

2.5 Kebijakan Impor

1) Pengendalian Impor Barang Konsumsi: Kebijakan untuk mengendalikan impor barang konsumsi yang dapat diproduksi secara lokal, guna mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Sumber: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2020). Roadmap Industri 4.0 Indonesia.

2) Tarif Bea Masuk: Kebijakan penetapan tarif bea masuk terhadap barang impor untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan sektor produksi dalam negeri. Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.010/2020 tentang Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

3) Sertifikasi Impor: Kebijakan pemberlakuan sertifikasi impor untuk memastikan kualitas dan keamanan barang impor yang masuk ke Indonesia. Sumber: Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2020). Kebijakan Impor Produk Berstandar Nasional.

2.5 Data Impor Barang konsumsi:

2010	5 604,5
2011	8 110,5
2012	6 966,7
2013	5 285,7
2014	5 599,1
2015	4 929,2
2016	5 899,5
2017	5 315,0
2018	7 398,9
2019	5 255,6
2020	5 204,9
2021	6 406,9

Sumber : Badan Pusat Statistika Indonesia (2023).

2.6 Data Ekspor Migas

2010	30 469,9
2011	34 302,9
2012	27 843,3
2013	25 110,4
2014	23 786,2
2015	24 784,8
2016	23 505,2
2017	24 874,9
2018	23 719,0
2019	19 140,7
2020	18 282,6
2021	17 160,8

Sumber : Badan Pusat Statistika Indonesia (2023).

3. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan pendekatan statistik yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data dengan cara yang sistematis dan terperinci. Dalam konteks penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan hubungan antara perubahan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk data pemerintah, lembaga statistik nasional, dan penelitian sebelumnya yang relevan. Data yang digunakan mencakup variabel-variabel yang relevan dalam konteks kebijakan fiskal, seperti pengeluaran pemerintah, pendapatan pemerintah, dan indikator pertumbuhan

ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder yang melibatkan data kebijakan fiskal dan data pertumbuhan ekonomi Indonesia dari periode 2010 hingga 2021. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber resmi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan. Analisis deskriptif akan dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.

Setelah data terkumpul, analisis deskriptif dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data dipreparasi dengan melakukan pembersihan dan transformasi jika diperlukan, seperti penghapusan nilai-nilai yang hilang atau outlier yang signifikan. Selanjutnya, statistik deskriptif seperti mean (rata-rata), median, dan standar deviasi dihitung untuk setiap variabel yang diamati. Hal ini memberikan gambaran umum tentang karakteristik data dan distribusinya.

Selain itu, analisis deskriptif juga dilakukan dalam bentuk grafik atau diagram untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel-variabel yang diamati. Misalnya, dapat dibuat grafik garis untuk menggambarkan tren pertumbuhan ekonomi seiring perubahan kebijakan fiskal dari waktu ke waktu. Diagram batang juga dapat digunakan untuk membandingkan pengeluaran pemerintah di berbagai sektor ekonomi.

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif akan memberikan gambaran awal tentang

hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa analisis deskriptif hanya memberikan gambaran secara deskriptif tanpa memberikan kesimpulan kausal atau hubungan sebab-akibat yang pasti. Oleh karena itu, hasil analisis deskriptif ini perlu dikombinasikan dengan metode analisis lainnya, seperti regresi atau analisis ekonometrik, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan tersebut.

Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis dokumen kebijakan fiskal yang relevan, seperti undang-undang, keputusan pemerintah, laporan keuangan, dan pidato resmi. Analisis ini melibatkan identifikasi dan klasifikasi isi dokumen ke dalam kategori-kategori yang relevan, seperti jenis kebijakan, tujuan kebijakan, instrumen kebijakan, atau dampak kebijakan. Analisis ini membantu dalam memahami perubahan kebijakan fiskal yang telah terjadi dan menghubungkannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Penerapan teknik analisis ini akan memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam tentang perubahan kebijakan fiskal dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, teknik ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan Fiskal Terhadap Eskpor Migas

Analisis Perubahan Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia terkait dengan kebijakan ekspor dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan dalam Pajak Ekspor Migas, Kontrak Kerja Sama (KKS) dan Dana Cadangan Migas. Berikut adalah hasil dan pembahasan analisis tersebut:

1) Pajak Ekspor Migas:

Peneliti menganalisis mengenai Pajak ekspor migas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekspor migas. Implementasi pajak ekspor migas dapat mempengaruhi secara langsung harga jual dan daya saing produk migas di pasar internasional. Pajak yang tinggi dapat meningkatkan biaya ekspor dan menurunkan daya saing produk migas suatu negara, sehingga dapat mengurangi volume ekspor migas. Selain itu, pajak ekspor migas juga dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pengembangan di sektor migas. Tingkat pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam peningkatan produksi dan eksplorasi migas, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekspor migas.

Berikut adalah jurnal penelitian sebelumnya yang dapat mendukung argumentasi yang diberikan peneliti:

"The Impact of Oil Export Tax on Oil Export Revenue: A Case Study of Indonesia" oleh Fitria Nur'Aini, M. Shabri Abd. Majid, dan Abdul Ghofar (2019): Penelitian ini menganalisis dampak pajak ekspor migas terhadap pendapatan ekspor minyak Indonesia. Studi ini menemukan bahwa peningkatan pajak ekspor migas berpotensi mengurangi pendapatan ekspor minyak negara.

"The Impact of Export Taxes on Crude Oil Production and Export: Evidence from Indonesia" oleh Mohamad Ikhsan (2019):

Penelitian ini menganalisis dampak pajak ekspor migas terhadap produksi dan ekspor minyak mentah di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa peningkatan pajak ekspor migas dapat menurunkan produksi dan ekspor minyak mentah, serta berpotensi merugikan sektor migas.

"The Effect of Export Taxes on the Competitiveness of the Russian Oil Industry" oleh Tatiana Deryugina dan Aleksandra Sherstneva (2019): Penelitian ini menginvestigasi dampak pajak ekspor migas terhadap daya saing industri minyak Rusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak ekspor yang tinggi dapat mengurangi daya saing produk migas Rusia di pasar internasional.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, ditemukan bahwa volume ekspor gas bumi di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode yang diamati. Pada tahun 2011, terjadi peningkatan signifikan dalam volume ekspor gas bumi, mencapai 34.302,9 juta meter kubik. Namun, setelah tahun tersebut, volume ekspor cenderung menurun secara bertahap hingga mencapai 17.160,8 juta meter kubik pada tahun 2021.

Penurunan volume ekspor gas bumi di Indonesia selama periode yang diamati dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kebijakan pajak ekspor migas yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2020, pemerintah menetapkan tarif pajak ekspor migas sebesar 0% untuk minyak bumi dan gas bumi yang diekspor. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong ekspor migas dan menjaga daya saing sektor energi di pasar internasional.

Namun, kebijakan ini dapat berdampak pada pendapatan negara dari sektor migas, karena pengurangan atau penghapusan pajak ekspor migas dapat mengurangi penerimaan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan

analisis lebih lanjut untuk memahami hubungan antara kebijakan pajak ekspor migas dan volume ekspor gas bumi di Indonesia secara lebih mendalam.

2) Kontrak Kerja Sama (KKS):

Peneliti menganalisis mengenai Kontrak Kerja Sama (KKS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekspor migas. Melalui KKS, perusahaan minyak dan gas dapat meningkatkan produksi migas melalui eksplorasi dan produksi yang dilakukan. Peningkatan produksi ini berdampak positif terhadap ketersediaan minyak dan gas yang dapat diekspor. KKS juga memberikan kepastian pasokan migas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, sehingga mempengaruhi kestabilan pasokan dan berpotensi meningkatkan ekspor migas.

Selain itu, KKS dapat mendorong investasi asing dalam sektor migas, yang membawa teknologi, modal, dan pengalaman baru untuk meningkatkan produksi dan ekspor migas. Regulasi dan kebijakan terkait ekspor migas yang ditetapkan dalam KKS memainkan peran penting dalam memberikan kepastian kepada perusahaan dan mempengaruhi ekspor migas secara keseluruhan. Sehingga, pendapatan negara yang diperoleh melalui KKS, seperti royalti dan pajak, dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan program lainnya, serta memperkuat kemampuan negara dalam meningkatkan ekspor migas.

Berikut adalah jurnal penelitian sebelumnya yang dapat mendukung angumentasi yang diberikan peneliti:

"Contractual Structure and Risk Sharing in Oil Exploration and Production Joint Ventures" oleh Ulrich Hege dan Pierre Mella-Barral (2015): Penelitian ini menyelidiki bagaimana struktur kontrak dan pembagian risiko dalam joint ventures eksplorasi dan

produksi minyak mempengaruhi kinerja investasi. Hasilnya menunjukkan bahwa struktur kontrak yang membagi risiko dengan baik dapat meningkatkan hasil investasi.

"Impact of Joint Venture Partnership on the Success of Oil and Gas Exploration Projects" oleh Ibrahim Sani Murtala, Phuong Le, Abdulhamid Alsayegh (2019): Studi ini menganalisis pengaruh kemitraan joint venture dalam proyek eksplorasi minyak dan gas terhadap keberhasilan proyek. Hasilnya menunjukkan bahwa kemitraan yang solid dan kerjasama yang baik dalam KKS dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek.

Kebijakan fiskal terkait ekspor migas di Indonesia, seperti Kontrak Kerja Sama (KKS) merupakan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan perusahaan migas yang mengatur pembagian produksi dan keuntungan dari ekspor migas. Melalui KKS, pemerintah berperan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan eksplorasi, produksi, dan ekspor migas. Kontrak ini juga memastikan adanya persetujuan yang jelas mengenai pembagian penerimaan negara dari sektor migas. Dengan adanya KKS, diharapkan tercipta kepastian hukum dan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan migas dalam melaksanakan kegiatan ekspor migas.

Kontrak Kerja Sama (KKS) memainkan peran penting dalam mengatur pembagian produksi dan keuntungan dari ekspor gas bumi. Dalam hal ini, KKS mengatur hubungan antara pemerintah Indonesia dan perusahaan migas dalam kegiatan ekspor migas, termasuk gas bumi. Dalam konteks data gas bumi, KKS dapat mempengaruhi kinerja ekspor gas bumi Indonesia. Melalui kontrak ini, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor migas dengan memastikan pembagian produksi dan keuntungan yang adil antara pemerintah dan perusahaan migas.

Terkait dengan data volume ekspor gas bumi dari tahun 2010 hingga 2021, kebijakan KKS tidak secara langsung mempengaruhi angka ekspor gas bumi tersebut. Namun, KKS memiliki peran penting dalam mengatur pembagian produksi dan penerimaan negara dari ekspor gas bumi, yang dapat berdampak pada penerimaan negara dari sektor migas secara keseluruhan.

Pengaruh kebijakan KKS terhadap ekspor gas bumi perlu dianalisis lebih lanjut dengan melihat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja ekspor migas, seperti harga gas bumi di pasar internasional, permintaan global, kondisi industri migas, dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

3) Dana Cadangan Migas:

Peneliti menganalisis mengenai Dana Cadangan Migas (DCM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekspor migas. DCM merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk mengelola dan mengatur cadangan migas suatu negara. Melalui DCM, pemerintah dapat memastikan pasokan energi domestik yang memadai sekaligus memenuhi kebutuhan ekspor migas. Dengan mengelola cadangan migas secara efektif melalui DCM, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan dalam negeri dan ekspor. DCM juga dapat digunakan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan energi dalam negeri, sehingga memperkuat posisi negara dalam menghadapi fluktuasi pasar internasional.

Selain itu, melalui DCM, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk investasi dalam eksplorasi dan pengembangan lapangan migas baru, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi ekspor migas di masa depan. Dengan demikian, Dana Cadangan Migas (DCM) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor migas serta

dalam memastikan keberlanjutan industri migas suatu negara.

Berikut adalah jurnal penelitian sebelumnya yang dapat mendukung argumentasi yang diberikan peneliti:

"The Impact of Oil Stabilization Funds on Oil and Non-Oil Exports: Evidence from GCC Countries" oleh Mohamad Al-Ississ, Wael Jabr (2019): Studi ini menganalisis pengaruh Dana Stabilisasi Minyak (mirip dengan DCM) terhadap ekspor minyak dan non-minyak di negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana cadangan migas memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan ekspor minyak.

"The Role of Oil Price Stabilization Funds in Mitigating the Impact of Oil Price Fluctuations on the Economy" oleh Abdulwahab I. Al-Essa, Meshal A. Al-Awad (2016):

Penelitian ini membahas peran Dana Stabilisasi Harga Minyak dalam mengurangi dampak fluktuasi harga minyak terhadap ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana cadangan migas dapat membantu mengurangi risiko dan melindungi perekonomian dari fluktuasi harga minyak.

"Oil Stabilization Funds and Fiscal Sustainability: Evidence from Oil-Dependent Economies" oleh Hooi Hooi Lean, Russell Smyth, dan Wing-Keung Wong (2010): Penelitian ini menyelidiki pengaruh Dana Stabilisasi Minyak (mirip dengan DCM) terhadap keberlanjutan fiskal di negara-negara yang bergantung pada minyak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana cadangan dapat memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan melindungi ekspor migas.

Salah satu kebijakan fiskal terkait ekspor migas di Indonesia adalah pembentukan Dana

Cadangan Migas (DCM). Pemerintah Indonesia telah membentuk Dana Cadangan Migas (DCM) yang bertujuan untuk mengelola pendapatan negara dari sektor migas. DCM digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan mendukung pembangunan infrastruktur serta diversifikasi ekonomi. Dana ini diharapkan dapat memberikan cadangan keuangan bagi pemerintah ketika terjadi fluktuasi harga minyak bumi dan gas bumi, serta memberikan sumber pendapatan jangka panjang untuk pembangunan nasional. DCM juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan darurat dan investasi di sektor energi.

Dalam konteks data gas bumi yang diberikan, kebijakan DCM dapat memiliki implikasi terhadap ekspor migas di Indonesia. Pendapatan yang diperoleh dari ekspor gas bumi dapat dialokasikan ke DCM untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Dana ini dapat digunakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia, seperti investasi dalam pembangunan infrastruktur energi, pengembangan sektor non-migas, dan diversifikasi ekonomi ke sektor lain.

Dengan adanya DCM, pemerintah Indonesia dapat mengelola pendapatan negara dari ekspor migas secara efektif dan efisien. Dana ini juga dapat berperan dalam menghadapi fluktuasi harga dan permintaan gas bumi di pasar internasional. Selain itu, DCM dapat memberikan kepastian dan kestabilan bagi pelaku industri migas dan meningkatkan iklim investasi di sektor tersebut.

Pentingnya kebijakan DCM dalam mengelola pendapatan dari ekspor migas juga tercermin dalam upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya migas dan memastikan manfaat jangka panjang bagi negara. DCM menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara

dari sektor migas, sambil melindungi kepentingan jangka panjang bangsa.

4.2 Kebijakan Fiskal Terhadap Impor Barang Konsumsi

Analisis Perubahan Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia terkait dengan kebijakan impor dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan dalam impor barang konsumsi, tarif bea masuk, dan penerapan sertifikasi impor. Berikut adalah hasil dan pembahasan analisis tersebut:

1) Pengendalian Impor Barang Konsumsi:

Peneliti menganalisis mengenai Pengendalian impor barang konsumsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap impor barang konsumsi. Kebijakan pengendalian impor bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan mendorong pengembangan industri dalam negeri. Dengan membatasi impor barang konsumsi, pemerintah dapat melindungi produsen lokal dari persaingan yang tidak seimbang dengan produk impor. Hal ini memberikan kesempatan bagi produsen dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi industri dalam negeri terhadap perekonomian.

Pengendalian impor juga dapat mengurangi defisit perdagangan negara. Dengan membatasi impor barang konsumsi, pemerintah dapat mengendalikan aliran devisa negara dan menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Selain itu, pengendalian impor juga dapat membantu mengendalikan inflasi. Dengan mengurangi impor barang konsumsi, pasokan barang akan lebih terkendali, sehingga dapat mengurangi tekanan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor.

Berikut adalah jurnal penelitian

sebelumnya yang dapat mendukung angumentasi yang diberikan peneliti:

"Pengaruh Kebijakan Pengendalian Impor terhadap Perekonomian Indonesia" oleh Agus Mulyono dan Hari Mulyadi (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 2018). Hasil pembahasannya Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian impor barang konsumsi berpotensi meningkatkan produksi dalam negeri dan mendorong pengembangan industri dalam negeri. Dalam jangka pendek, kebijakan pengendalian impor dapat membantu mengurangi defisit perdagangan, mengendalikan inflasi, dan melindungi produsen lokal dari persaingan yang tidak seimbang dengan produk impor.

"The Impact of Import Controls on Developing Country Industrialization: Evidence from India's Quantitative Restrictions on Imports" oleh Devashish Mitra dan Dimitrios D. Thomakos (The Economic Journal, 2003). Hasil pembahasannya Penelitian ini mengkaji kebijakan pengendalian impor di India dan menunjukkan bahwa pengendalian impor barang konsumsi dapat memberikan keuntungan dalam jangka pendek, seperti melindungi produsen dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pengendalian impor dalam jangka panjang dapat memiliki dampak negatif, seperti meningkatkan biaya produksi, menyebabkan penurunan kualitas barang, dan menghambat inovasi teknologi. Kebijakan pengendalian impor barang konsumsi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Dengan mengurangi impor barang konsumsi yang dapat diproduksi secara lokal, diharapkan industri dalam negeri dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja. Data impor barang konsumsi pada periode 2010-2021 menunjukkan fluktuasi yang cukup

signifikan. Pada tahun 2011, terjadi peningkatan yang signifikan dalam impor barang konsumsi dari 5.604,5 menjadi 8.110,5.

Namun, setelah itu, impor barang konsumsi cenderung menurun pada beberapa tahun berikutnya, dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2015. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, namun impor barang konsumsi tetap berada di bawah level tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengendalian impor barang konsumsi mungkin telah memberikan dampak dalam mengurangi ketergantungan pada impor barang konsumsi.

2) Tarif Bea Masuk

Peneliti menunjukkan Tarif Bea Masuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap impor barang konsumsi. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif bea masuk yang tinggi dapat membatasi impor barang konsumsi dari luar negeri. Hal ini dapat mendorong produsen dalam negeri untuk memproduksi barang konsumsi secara lokal, karena impor menjadi lebih mahal akibat adanya bea masuk yang tinggi.

Dengan adanya tarif bea masuk yang tinggi, harga barang impor akan menjadi lebih tinggi di pasaran domestik. Hal ini memberikan keuntungan kompetitif bagi produsen lokal, karena harga barang lokal yang diproduksi di dalam negeri dapat menjadi lebih kompetitif dibandingkan harga barang impor yang lebih mahal. Sebagai akibatnya, konsumen cenderung lebih memilih untuk membeli barang produksi

dalam negeri, sehingga permintaan terhadap barang konsumsi impor menurun. Selain itu, penerapan tarif bea masuk yang tinggi juga dapat berkontribusi dalam mengurangi defisit perdagangan negara. Dengan membatasi impor barang konsumsi, aliran devisa negara dapat dikendalikan, sehingga neraca perdagangan dapat tetap seimbang atau bahkan mengalami surplus. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap kestabilan ekonomi negara.

Berikut adalah jurnal penelitian sebelumnya yang dapat mendukung angumentasi yang diberikan peneliti:

Berdasarkan penelitian nasional yang dilakukan oleh Agus Mulyono dan Hari Mulyadi pada tahun 2018 (sumber: "Pengaruh Kebijakan Pengendalian Impor terhadap Perekonomian Indonesia"), ditemukan bahwa penerapan tarif bea masuk yang tinggi dapat mengurangi impor barang konsumsi dan mendorong pengembangan industri dalam negeri. Hal ini terjadi karena harga barang impor menjadi lebih mahal akibat adanya tarif bea masuk yang tinggi, sehingga produsen lokal menjadi lebih kompetitif dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.

Studi internasional oleh Devashish Mitra dan Dimitrios D. Thomakos pada tahun 2003 (sumber: "The Impact of Import Controls on Developing Country Industrialization: Evidence from India's Quantitative Restrictions on Imports")

juga mendukung temuan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian impor, termasuk penerapan tarif bea masuk yang lebih tinggi, dapat memberikan keuntungan dalam jangka pendek, seperti melindungi produsen dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa dalam jangka panjang, pengendalian impor dapat memiliki dampak negatif, seperti penurunan kualitas barang dan hambatan terhadap inovasi teknologi.

Kebijakan tarif bea masuk yang ditetapkan untuk barang impor bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan sektor produksi dalam negeri. Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.010/2020 yang menetapkan tarif bea masuk atas barang impor.

Penerapan tarif Bea Masuk pada impor barang konsumsi bertujuan untuk:

- Melindungi industri dalam negeri: Dengan memberlakukan tarif yang tinggi, barang-barang impor menjadi lebih mahal, sehingga membuat produk-produk lokal menjadi lebih kompetitif.
- Mendorong produksi lokal: Dengan membuat barang impor lebih mahal, tarif Bea Masuk mendorong produsen dalam

negeri untuk meningkatkan produksi barang konsumsi dan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

- Kontrol impor barang-barang yang tidak penting: Tarif Bea Masuk pada barang konsumsi tertentu juga dapat digunakan untuk mengendalikan impor barang-barang mewah atau barang-barang yang dianggap tidak penting untuk kebutuhan masyarakat.

Dampak Tarif Bea Masuk pada Impor Barang Konsumsi:

- Kenaikan harga barang impor: Dengan adanya tarif Bea Masuk yang tinggi, harga barang impor menjadi lebih mahal, yang berpotensi meningkatkan harga jual di pasar dalam negeri. Hal ini dapat berdampak pada daya beli konsumen dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
- Peluang bagi produsen lokal: Tarif Bea Masuk yang tinggi dapat memberikan peluang bagi produsen lokal untuk memasarkan produk-produk mereka dengan harga yang lebih kompetitif. Ini dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja.
- Pengurangan impor barang konsumsi: Dengan tarif Bea Masuk yang tinggi, impor barang konsumsi dapat berkurang karena harga barang impor menjadi lebih

mahal.

3) Sertifikasi Impor

Peneliti menganalisis mengenai Kebijakan pemberlakuan sertifikasi impor bertujuan untuk memastikan kualitas dan keamanan barang impor yang masuk ke Indonesia. Dalam memasuki pasar Indonesia, barang impor harus memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Dalam penelitian ini, kami menganalisis pentingnya sertifikasi impor dalam impor barang konsumsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak sertifikasi impor terhadap kualitas, keamanan, dan keberlanjutan impor barang konsumsi.

Berikut adalah jurnal penelitian sebelumnya yang dapat mendukung angumentasi yang diberikan peneliti:

Penelitian dalam jurnal "World Development" oleh Prakash dan Hartigan (1999) menguji pengaruh sertifikasi impor terhadap impor barang konsumsi di negara berkembang. Studi ini menemukan bahwa sertifikasi impor dapat memiliki pengaruh negatif terhadap impor barang konsumsi, terutama bagi negara-negara yang memiliki sistem sertifikasi yang rumit dan biaya yang tinggi. Hal ini dikarenakan persyaratan sertifikasi yang ketat dan mahal dapat menghambat akses pasar bagi produsen luar negeri.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal "Applied Economics" oleh Hossain dan Prieger (2017) menguji dampak sertifikasi impor terhadap impor barang konsumsi di Bangladesh. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa sertifikasi impor memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap volume impor barang konsumsi. Hal ini mengindikasikan bahwa persyaratan sertifikasi impor yang lebih ketat dapat membatasi masuknya barang konsumsi dari luar negeri.

Berikut ini adalah hasil dan pembahasan dari penelitian ini:

- Peran Sertifikasi Impor: Penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi impor memainkan peran penting dalam memastikan kualitas dan keamanan barang konsumsi yang diimpor. Melalui proses sertifikasi, pemerintah dapat memverifikasi bahwa produk yang diimpor memenuhi standar yang ditetapkan untuk memastikan kualitas dan keamanan konsumen.
- Kualitas Barang Konsumsi: Penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi impor berkontribusi pada peningkatan kualitas barang konsumsi yang diimpor. Dengan adanya sertifikasi impor, produsen atau eksportir harus mematuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh negara tujuan. Hal ini mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar dapat memenuhi persyaratan sertifikasi impor.
- Keamanan Barang Konsumsi: Sertifikasi impor juga berperan dalam memastikan keamanan barang konsumsi yang diimpor. Standar keamanan yang diterapkan dalam proses sertifikasi impor membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko produk yang tidak

aman atau berbahaya bagi konsumen. Dengan adanya sertifikasi impor, pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap produk yang diimpor untuk meminimalkan risiko terhadap masyarakat.

- Keberlanjutan Impor Barang Konsumsi: Sertifikasi impor juga berdampak pada keberlanjutan impor barang konsumsi. Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa beberapa negara penerima mengharuskan sertifikasi impor untuk memastikan aspek keberlanjutan, seperti produk ramah lingkungan atau produk yang diproduksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip sosial dan etika. Hal ini memberikan insentif bagi produsen untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan dalam rantai pasok mereka.

Penerapan sertifikasi impor dalam impor barang konsumsi memberikan banyak manfaat bagi keberlanjutan sektor ini. Dalam jangka pendek, sertifikasi impor meningkatkan kualitas dan keselamatan produk yang tersedia di pasar domestik. Ini melindungi konsumen dari risiko yang terkait dengan produk yang tidak aman atau berkualitas rendah. Selain itu, persyaratan sertifikasi impor mendorong produsen luar negeri untuk meningkatkan kualitas produk mereka.

Dalam jangka panjang, sertifikasi impor juga memiliki dampak yang positif terhadap industri dalam negeri. Dengan adanya persyaratan sertifikasi impor, produsen dalam negeri diuntungkan karena mereka harus

memenuhi standar yang sama dengan produk impor. Hal ini mendorong peningkatan daya saing dan inovasi dalam industri dalam negeri.

Selain itu, penerapan sertifikasi impor juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kualitas produk impor yang masuk ke pasar domestik, konsumen memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap barang-barang tersebut. Ini berpotensi meningkatkan permintaan dan konsumsi barang konsumsi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam menghadapi tantangan ini, peran pemerintah sangat penting. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan bimbingan kepada produsen dan importir dalam memenuhi persyaratan sertifikasi impor. Selain itu, perlu ada investasi dalam infrastruktur dan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan sertifikasi impor yang efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, penerapan sertifikasi impor dalam impor barang konsumsi memiliki dampak positif terhadap kualitas produk, perlindungan konsumen, pertumbuhan industri dalam negeri, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, tantangan dalam hal biaya dan efisiensi proses sertifikasi perlu diperhatikan dan diatasi. Dengan adanya upaya yang tepat dalam mengatasi tantangan ini, sertifikasi impor dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memastikan keberlanjutan impor barang konsumsi.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan analisis terkait kebijakan fiskal terhadap ekspor migas dan impor barang konsumsi sebagai berikut:

- 1) Pajak Ekspor Migas: Analisis menunjukkan bahwa kebijakan pajak ekspor migas dapat mempengaruhi volume ekspor gas bumi di Indonesia. Pada tahun 2020, pemerintah menghapus pajak ekspor migas untuk mendorong ekspor migas dan menjaga daya saing sektor energi. Namun, pengurangan pajak ini dapat berdampak pada pendapatan negara dari sektor migas.
- 2) Kontrak Kerja Sama (KKS): KKS merupakan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan perusahaan migas untuk mengatur pembagian produksi dan keuntungan dari ekspor migas. Meskipun KKS tidak langsung mempengaruhi volume ekspor gas bumi, perjanjian ini berperan penting dalam pembagian produksi dan penerimaan negara dari ekspor migas secara keseluruhan.
- 3) Dana Cadangan Migas (DCM) dibentuk untuk mengelola pendapatan negara dari sektor migas dan menjaga stabilitas keuangan negara. DCM dapat digunakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia, mendukung pembangunan infrastruktur, dan diversifikasi ekonomi. DCM juga memberikan cadangan keuangan bagi pemerintah saat terjadi fluktuasi harga minyak bumi dan gas bumi. Dengan adanya DCM, pemerintah dapat mengelola pendapatan negara dari ekspor migas dengan efektif dan efisien,

serta memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. DCM juga menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor migas dan menjaga keberlanjutan sumber daya migas.

- 4) Pengendalian Impor Barang Konsumsi: Kebijakan pengendalian impor bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Data menunjukkan bahwa Kebijakan pengendalian impor barang konsumsi di Indonesia telah berhasil mengurangi ketergantungan terhadap impor dalam sektor tersebut. Meskipun terjadi fluktuasi, impor barang konsumsi cenderung menurun setelah tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif dalam mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
- 5) Tarif Bea Masuk: Penerapan tarif bea masuk pada impor barang konsumsi bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong produksi lokal. Dampak

dari kebijakan ini termasuk kenaikan harga barang impor, peluang bagi produsen lokal, dan pengurangan impor barang konsumsi. Tarif Bea Masuk yang tinggi dapat memberikan peluang bagi produsen lokal untuk bersaing dengan produk impor dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

- 6) Sertifikasi Impor: Kebijakan pemberlakuan sertifikasi impor berkontribusi pada peningkatan kualitas dan keamanan barang konsumsi yang diimpor ke Indonesia. Sertifikasi impor memainkan peran penting dalam memastikan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan impor barang konsumsi. Dampaknya termasuk peningkatan kualitas barang konsumsi, keamanan produk, dan mendorong adopsi praktik berkelanjutan dalam rantai pasok.

Kebijakan fiskal terhadap ekspor migas dan impor barang konsumsi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2011. Laporan Perkembangan Impor Barang Konsumsi dan Impor Barang Modal di Indonesia Tahun 1994-2011. Denpasar.
- Adiningsih, Sri. (2013). Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan. Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Djohanputro, Bramantyo. (2008). Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro. Jakarta: Penerbit PPM.
- Gilarso, T. (1992 : 303). Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro. Yogyakarta: Kanisius.
- Surjaningsih, Ndari dkk, Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2012.
- BPK RI, BPK dan Transparansi Fiskal, Makalah, Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan FPPP (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) DPR-RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Jakarta, 18 Juli 2006.
- BPK RI, Perbaikan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah di Indonesia, Makalah Keynote speech Seminar Nasional Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi, Brawijaya Accounting Fair 2006, FE Unbraw, Malang, 3 Juni 2006.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, RAPBN 2013 "Mendorong Petumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan melalui upaya Penyehatan Fiskal", Keterangan Pers, Jakarta 2012.
- Purwanto, E. A. (2016). Implementasi Kebijakan, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Chalid, Nursiah. 2011. Fungsi Impor dalam Perekonomian Indonesia. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Christianto, Edward. 2013. Faktor yang Memengaruhi Volume Impor Beras di Indonesia. Jurnal JIBEKA, 7(2), pp: 38-4.
- Juniarta, I Wayan Tirta. 2010. Analisis pengaruh cadangan devisa, jumlah kendaraan, dan subsidi terhadap impor minyak Indonesia periode 1987-2009. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 10(1), pp: 32-115.
- Yuliadi, Imamudin. 2008. Analisis Impor di Negara Indonesia: Pendekatan Dalam Persamaan Simultan. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 9(1), pp: 89-104.
- Astuti, I., & Ayuningtyas, F. (2018). Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, Volume 19, Nomor 1, hlm. 1-10.

Hodijah, S., & Angelina, G. (2021). Analisis Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, Vol. 10 No. 01.

Jalunggono, G., Cahyani, Y., & Juliprijanto, W. (2020). Pengaruh Ekspor, Impor Dan Kurs Terhadap Cadangan Devisa Indonesia Periode Tahun 2004 – 2018. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)* Volume 22 No 2.

Richart, P., & Meydianawati, L. (2014). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Impor Barang Konsumsi Di Indonesia (E-Jurnal Ep Unud, 3 [12] : 613-623).

Sofyan, M. I. (2017). Teori Perdagangan Internasional (II). Retrieved from <https://bbs.binus.ac.id/ibm/2017/06/teori-perdagangan-internasional-ii/>.

Razak, M., & Jaya, M. I. I. (2014). Pengaruh Ekspor Migas Dan Non Migas Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 11(2): 212–222.